

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PENELITIAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian secara berlanjut dalam jangka panjang yang diwujudkan melalui kenaikan output Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Menurut Todaro dan Smith (2011), pertumbuhan ekonomi mencerminkan kenaikan kapasitas suatu daerah dalam menyediakan berbagai barang dan jasa ekonomi bagi penduduknya, yang didukung oleh kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan. Sejalan dengan hal tersebut, Boediono (2018) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas dan kenaikan output per kapita secara berkelanjutan. Dalam analisis perekonomian daerah, indikator ini diukur melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) guna mengeliminasi dampak inflasi.

Berdasarkan kerangka teori makroekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh faktor penawaran dan permintaan agregat, di antaranya:

1. Pengeluaran Pemerintah (Fiskal): Menurut teori Keynesian, pengeluaran pemerintah merupakan komponen krusial dalam merangsang permintaan agregat (*aggregate demand*). Dalam struktur APBD, pengeluaran ini terbagi menjadi Belanja Modal untuk pembentukan aset produktif jangka panjang dan Belanja Operasional untuk menjaga kelancaran roda birokrasi serta pelayanan publik.
2. Investasi: Dalam kerangka teori Harrod-Domar, investasi bertindak sebagai instrumen utama pembentukan modal (*capital formation*) yang secara langsung memperluas kapasitas produksi nasional maupun daerah.

3. Konsumsi Masyarakat: Merupakan komponen terbesar pembentuk permintaan agregat. Tingginya daya beli Masyarakat yang dalam penelitian ini diproksikan melalui rata-rata pengeluaran per kapita akan mendorong produsen meningkatkan volume output barang dan jasa di pasar riil.

2.1.2 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi regional diukur melalui laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menurut pendekatan pengeluaran. Penggunaan harga konstan bertujuan untuk mengeliminasi faktor inflasi sehingga mencerminkan perubahan volume output riil secara tepat (Todaro & Smith, 2015).

Pendekatan pengeluaran dipilih karena mampu menggambarkan aktivitas ekonomi dari sisi permintaan agregat (*aggregate demand*). Menurut kerangka teori Keynesian, total output perekonomian (Y) dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan / Output riil daerah (PDRB)
- C = Konsumsi rumah tangga (diproksikan oleh Pengeluaran Per Kapita)
- I = Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto / PMTB)
- G = Pengeluaran pemerintah (Belanja Modal & Belanja Operasional)
- $X - M$ = Ekspor neto

Laju pertumbuhan ekonomi (PE_t) dihitung dari perubahan relatif PDRB ADHK tahun berjalan ($PDRB_t$) dibandingkan dengan tahun sebelumnya ($PDRB_{t-1}$) menggunakan formula:

$$PE_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PE_t = Laju pertumbuhan ekonomi tahun ke- t (%)

- $PDRB_t = \text{PDRB ADHK tahun berjalan}$
- $PDRB_{t-1} = \text{PDRB ADHK tahun sebelumnya}$

2.1.3 Pendapatan Nasional dan Pelaku Ekonomi

Pendapatan nasional mencerminkan total nilai output barang dan jasa serta tingkat aktivitas ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu (Sukirno, 2005). Menurut Mankiw (2003), pendapatan nasional dari sisi pendekatan pengeluaran ditentukan oleh seluruh komponen permintaan agregat yang mencakup interaksi antara empat pelaku ekonomi utama:

1. Rumah Tangga Konsumen (RTK): Penyedia faktor produksi yang melakukan konsumsi atas output barang dan jasa.
2. Rumah Tangga Produsen (RTP): Pengelola faktor produksi yang menghasilkan output dan menciptakan nilai tambah perekonomian.
3. Rumah Tangga Pemerintah (RTN): Regulator perekonomian yang mengintervensi pasar melalui kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*).
4. Rumah Tangga Luar Negeri (RTLN): Pelaku transaksi perdagangan internasional melalui ekspor dan impor.

2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Menurut Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776), pertumbuhan ekonomi didorong oleh akumulasi modal, pembagian kerja (*division of labour*), dan perluasan pasar. Smith menekankan bahwa akumulasi modal yang merefleksikan peran investasi dan belanja Pembangunan merupakan syarat utama untuk meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi riil. Teori ini sangat relevan dalam menjelaskan bahwa peningkatan alokasi investasi (LN3_INV) dan belanja modal pemerintah (X1_BM) bertindak sebagai katalisator utama dalam memperluas skala produksi dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

b. Teori Pertumbuhan David Ricardo

David Ricardo menekankan bahwa pertumbuhan output merupakan fungsi dari interaksi antara modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Akumulasi modal memungkinkan penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal serta peningkatan kapasitas produksi daerah. Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Ricardo mendasari pentingnya peranan investasi daerah serta pengendalian faktor demografi (LNZ_JM) dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi guna mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.5 Teori Pertumbuhan Keynes

Teori Keynesian (*John Maynard Keynes, 1936*) menekankan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dan output riil short-run ditandai dan ditentukan oleh tingkat permintaan agregat (*aggregate demand*). Keynes menolak pandangan klasik mengenai mekanisme pasar bebas yang selalu dapat mencapai keseimbangan secara otomatis, sehingga menggarisbawahi krusialnya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal intervensi.

Dalam kerangka ini, peningkatan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure/G*) dan investasi (*Investment/I*) bertindak sebagai stimulus penarik permintaan (*demand pull*) yang akan melipatgandakan output nasional/daerah melalui mekanisme angka pengganda (*multiplier effect*). Kerangka teori Keynesian sangat relevan dan menjadi landasan teoretis utama penelitian ini, di mana komponen permintaan agregat diproses secara langsung oleh:

1. Pengeluaran Pemerintah (*G*): Direpresentasikan melalui struktur belanja daerah, yaitu Belanja Modal (X1_BM) untuk pembentukan kapasitas fisik dan Belanja Operasional (LN2_BO) untuk menjaga kelancaran layanan birokrasi.
2. Investasi (*I*): Direpresentasikan melalui tingkat Pembentukan Modal Tetap Bruto (LN3_INV) guna memperluas kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja.

3. Konsumsi (*C*): Direpresentasikan melalui Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (*LN_{X4}_RPP*) sebagai cerminan daya beli masyarakat dalam menyerap output barang dan jasa di pasar riil.

2.1.6 Teori Harrod- Domar

Teori Harrod-Domar (*Roy F. Harrod, 1939; Evsey Domar, 1946*) menekankan bahwa akumulasi dan pembentukan modal (*capital formation*) melalui kegiatan investasi merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Menurut Jhingan (2016), investasi memiliki sifat ganda (*dual aspect*), yaitu meningkatkan permintaan agregat (*income effect*) sekaligus memperluas kapasitas produksi nasional/daerah (*capacity effect*).

Secara ekonometris, hubungan antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi dirumuskan sebagai berikut:

$$g = \frac{s}{COR}$$

Keterangan:

- g = Laju pertumbuhan ekonomi (*growth rate of output*)
- s = Rasio tabungan/investasi terhadap pendapatan (I/Y)
- COR = *Capital Output Ratio* (efisiensi penggunaan modal untuk menghasilkan satu unit output)

2.1.7 Teori Multiplier Effect

Teori *Multiplier Effect* yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes dan disempurnakan oleh Mankiw (2019) menjelaskan bahwa suatu injeksi pengeluaran awal dalam perekonomian akan menghasilkan peningkatan pendapatan nasional/daerah secara berlipat

ganda. Secara matematis, besarnya angka pengganda (k) ditentukan oleh besarnya kecenderungan mengonsumsi marjinal (*Marginal Propensity to Consume* / MPC):

$$k = \frac{1}{1 - MPC}$$

Keterangan:

- k = Nilai *multiplier* (angka pengganda)
- MPC = Kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi tambahan pendapatan ($0 < MPC < 1$)

Dalam konteks penelitian ini, mekanisme *multiplier effect* bekerja melalui tiga saluran utama:

1. Injeksi Fiskal Daerah (X1_BM dan LNX2_BO): Alokasi Belanja Modal dan Belanja Operasional pemerintah daerah bertindak sebagai pengeluaran awal yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan penyedia barang/jasa, serta menggerakkan sektor riil.
2. Injeksi Modal Swasta (LNX3_INV): Pembentukan modal tetap melalui investasi merangsang penyerapan tenaga kerja baru dan meningkatkan kapasitas output daerah.
3. Efek Lanjutan Konsumsi (LNX4_RPP): Peningkatan pendapatan dari aktivitas ekonomi awal diputar kembali oleh masyarakat melalui konsumsi harian (diproksikan oleh Pengeluaran Per Kapita). Semakin tinggi MPC masyarakat daerah, semakin besar putaran efek pengganda yang dihasilkan terhadap laju Pertumbuhan Ekonomi (Y_{PE}) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

2.1.8 Teori Walt Whitman Rostow

Teori pertumbuhan ekonomi Walt Whitman Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses linier bertahap dari masyarakat tradisional (*traditional society*), prasyarat lepas landas (*preconditions for take-off*), lepas landas (*take-off*), menuju kedewasaan (*drive to maturity*), hingga tahap konsumsi massal tinggi (*high mass consumption*).

Dalam kerangka teori Rostow, fase lepas landas (*take-off*) menjadi titik krusial di mana laju investasi produktif meningkat pesat hingga melampaui 10% dari pendapatan nasional/daerah, didukung oleh ekspansi sektor manufaktur dan pembentukan modal infrastruktur oleh pemerintah. Relevansi teori Rostow dalam penelitian ini terletak pada keterkaitan antara tiga penggerak utama transisi struktur ekonomi daerah:

1. Transformasi Investasi dan Modal (LNX3_INV): Peningkatan akumulasi investasi produktif bertindak sebagai pemacu (*katalisator*) utama untuk mendorong daerah keluar dari stagnasi dan memasuki fase lepas landas.
2. Peran Pembangunan Pemerintah (X1_BM): Intervensi belanja modal dialokasikan untuk menyediakan barang modal dasar dan infrastruktur publik guna menopang efisiensi efektivitas sektor industri.
3. Peningkatan Kesejahteraan dan Konsumsi (LNX4_RPP): Penguatan daya beli masyarakat yang tercermin dari pengeluaran per kapita menandai pergeseran struktur ekonomi menuju tahap konsumsi massal tinggi (*high mass consumption*).

2.1.9 Teori Struktur Belanja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan dan pelayanan publik. Belanja daerah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai instrumen alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi daerah (Halim, 2014).

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan sifat kegunaannya menjadi dua komponen utama:

1. Belanja Operasional (LNX2_BO): Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek (habis pakai dalam satu

periode anggaran), seperti belanja pegawai serta barang dan jasa. Fungsi utamanya adalah menjaga kelancaran birokrasi dan keberlanjutan pelayanan publik rutin.

2. Belanja Modal (X1_BM): Pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pengadaan aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (berjangka panjang). Belanja modal bersifat produktif karena membentuk aset fisik (jalan, jembatan, gedung, irigasi) yang meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Perbedaan kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan antar-kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menyebabkan variasi alokasi kedua struktur belanja ini. Dalam kerangka makroekonomi, gabungan Belanja Modal dan Belanja Operasional merepresentasikan intervensi pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure/G*) yang memberikan stimulus fiskal secara langsung terhadap roda perekonomian daerah.

2.1.9.1 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang menghasilkan pembentukan modal (*capital formation*) melalui perolehan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Musgrave, 1959; Mardiasmo, 2018). Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 77 Tahun 2020, serta UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD), Belanja Modal dalam struktur APBD dialokasikan untuk pengadaan infrastruktur publik, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, serta jaringan irigasi guna meningkatkan daya dukung perekonomian daerah.

Berbeda dengan belanja operasional yang bersifat konsumtif jangka pendek, belanja modal bersifat produktif karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas pelayanan publik dan efisiensi sektor riil dalam jangka panjang. Pengalokasian belanja modal di tingkat kabupaten/kota dipengaruhi oleh empat determinan utama:

1. Kapasitas Fiskal Daerah: Tingkat kemampuan APBD yang bersumber dari PAD dan Dana Transfer.

2. Prioritas RPJMD: Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
3. Kebutuhan Infrastruktur Spasial: Luas wilayah, karakteristik demografi, dan ketersediaan sarana publik.
4. Kebijakan Transfer Pusat: Alokasi dana perimbangan yang di-*earmark* untuk pembangunan fisik.

2.1.9.2 Teori Belanja Operasional

Belanja Operasional merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin keberlangsungan roda birokrasi dan pelayanan publik, yang manfaatnya habis dalam satu periode anggaran tanpa menambah aset tetap (Musgrave, 1959; Mardiasmo, 2018). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD), PP No. 71 Tahun 2010, dan Permendagri No. 77 Tahun 2020, struktur belanja operasional mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial.

Berbeda dengan belanja modal yang bersifat produktif jangka panjang, belanja operasional cenderung bersifat konsumtif (*short-term consumption*). Besarnya alokasi belanja ini di tingkat kabupaten/kota ditentukan oleh empat faktor utama:

1. Jumlah dan Struktur ASN: Komponen terbesar penyerap belanja pegawai yang diikat oleh kewajiban *mandatory spending*.
2. Cakupan Standar Pelayanan Minimum (SPM): Luasnya penyediaan layanan dasar masyarakat yang membutuhkan belanja barang dan jasa habis pakai.
3. Kapasitas Fiskal Daerah: Kemampuan pembiayaan rutinitas internal APBD.
4. Komitmen Jaringan Pengaman Sosial & Regulasi Pusat: Alokasi hibah, bansos, serta kewajiban regulasi yang mengikat.

2.1.9.3 Hubungan Struktur Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan teori Keynes (1936), pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure/G*) merupakan instrumen fiskal utama pembentuk permintaan agregat (*aggregate*

demand). Peningkatan belanja daerah melalui APBD secara langsung menstimulasi output dan pendapatan masyarakat melalui *multiplier effect* (Samuelson & Nordhaus, 2010). Dalam kerangka pembangunan daerah, respons pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh alokasi struktur belanja daerah:

1. Dampak Belanja Modal (X1_BM): Berdampak langsung dan berjangka panjang (*long-run effect*). Pengalokasian belanja modal untuk infrastruktur fisik (jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik) berfungsi sebagai bentuk investasi produktif (Musgrave & Musgrave, 1989). Infrastruktur yang memadai menurunkan biaya logistik, memperlancar rantai pasok, menarik investasi swasta, dan memperluas kapasitas produksi daerah.
2. Dampak Belanja Operasional (LNX2_BO): Berdampak tidak langsung dan cenderung berjangka pendek (*short-run effect*). Melalui belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, pengeluaran ini menjaga daya beli ASN/masyarakat dan menyokong konsumsi rumah tangga (C). Efektivitasnya bergantung pada efisiensi birokrasi dalam menjamin kelancaran kelangsungan pelayanan publik.

Dengan demikian, Belanja Modal (X1_BM) diposisikan sebagai pendorong utama perluasan kapasitas output riil (*supply side*), sedangkan Belanja Operasional (LNX2_BO) berperan memelihara stabilitas konsumsi harian dan efisiensi birokrasi pendukung (*demand side*). Kombinasi keduanya menjadi faktor penentu dinamika Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

2.1.10 Teori Realisasi Investasi

Realisasi investasi merupakan bentuk nyata pengakumulasian modal (*capital accumulation*) yang dialokasikan pada sektor-sektor produktif dalam suatu daerah selama periode tertentu. Dalam sistem Penilaian Pendapatan Nasional dan Regional (PDRB) menurut

BPS, data realisasi investasi fisik direpresentasikan melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PMTB mengukur pengeluaran untuk penambahan aset tetap riil seperti mesin, peralatan, kendaraan, bangunan, serta jaringan fisik dikurangi dengan pelepasan aset tetap bekas. Pembentukan modal ini dipilah menjadi dua instrumen penanaman modal utama:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN): Alokasi modal produktif yang bersumber dari entitas atau pelaku usaha domestik.
2. Penanaman Modal Penanam Modal Foreign/Asing (PMA): Arus masuk modal asing (*foreign direct investment*) yang memperluas kapasitas manufaktur, transfer teknologi, serta integrasi rantai pasok global.

Berbeda dengan investasi portofolio yang bersifat finansial jangka pendek, PMTB berfokus pada aset fisik produktif yang tidak habis pakai dalam satu periode. Dalam konteks ekonomi regional, besarnya tingkat PMTB mencerminkan kesiapan serta daya tarik daerah dalam meningkatkan aset kapital dan kapabilitas produksi jangka panjang.

2.1.10.1. Hubungan Realisasi Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Hubungan antara realisasi investasi (PMTB) dan pertumbuhan ekonomi berakar kuat pada kerangka teori Klasik (Adam Smith), Harrod-Domar, serta Keynesian:

1. Perspektif Sisi Penawaran (*Supply-Side Effect*):

Berdasarkan teori Harrod-Domar (1946) dan Smith (1776), peningkatan realisasi investasi bertindak sebagai penambah kapasitas produksi riil (*capital stock*). Masuknya aset fisik baru melalui PMDN dan PMA secara langsung memperluas skala industri, memodernisasi alat produksi, serta memperlancar efisiensi manufaktur. Kapasitas

output yang membesar ini menjadi penopang utama penawaran agregat untuk mendorong kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2. Perspektif Sisi Permintaan (*Demand-Side Effect*):

Melalui kerangka Keynesian (1936) dan mekanisme *multiplier effect* (Mankiw, 2019), investasi (*I*) merupakan komponen utama permintaan agregat. Pengeluaran awal untuk proyek investasi—seperti pembangunan pabrik baru atau pembelian peralatan industri—menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan ini selanjutnya mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga (*C*), sehingga memicu perputaran ekonomi yang lebih luas (*domino effect*).

Dengan demikian, Realisasi Investasi (LNX3_INV) memiliki hubungan positif dan strategis terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dalam penelitian ini, investasi diposisikan sebagai mesin penggerak utama (*engine of growth*) yang tidak hanya melipatgandakan permintaan pasar jangka pendek, tetapi juga memperkuat struktur kapasitas output riil kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

2.1.11 Teori Rata-rata Pengeluaran Perkapita

Rata-rata pengeluaran per kapita merupakan indikator Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengukur tingkat kesejahteraan, daya beli, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan hidup (makanan dan non-makanan). Dalam analisis makroekonomi, variabel ini merupakan proksi utama dari konsumsi rumah tangga (*Consumption/C*).

Menurut Sukirno (2016) dan Mankiw (2019), konsumsi rumah tangga merupakan porsi terbesar dalam membentuk permintaan agregat (*aggregate demand*). Peningkatan pengeluaran per kapita secara langsung merangsang peningkatan output daerah karena produsen merespons kenaikan permintaan barang/jasa tersebut (Todaro & Smith, 2011). Sebaliknya, pengeluaran

per kapita yang rendah mencerminkan keterbatasan pendapatan dan lesunya aktivitas sektor riil.

Dalam penelitian ini, Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (LN_PPK) diposisikan sebagai variabel pembentuk permintaan agregat pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel ini digunakan untuk melihat seberapa besar kekuatan daya beli dan konsumsi masyarakat dalam menstimulasi Pertumbuhan Ekonomi daerah.

2.1.11.1 Hubungan Rata-rata Pengeluaran Perkapita dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan teori Keynes (1936), konsumsi rumah tangga (C) yang direpresentasikan oleh Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (LN_PPK) merupakan komponen dominan dalam pembentukan permintaan agregat (*aggregate demand*). Peningkatan daya beli dan pengeluaran masyarakat secara langsung menstimulasi peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, serta perluasan sektor perdagangan dan jasa (Todaro & Smith, 2011; Sukirno, 2016).

Melalui pendekatan *multiplier effect* (Samuelson & Nordhaus, 2010), setiap kenaikan konsumsi masyarakat menciptakan efek pengganda yang mempercepat perputaran uang di sektor riil. Peningkatan transaksi ini memberikan pendapatan lanjutan bagi pelaku usaha dan masyarakat, yang pada akhirnya secara konsisten menggerakkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Dengan demikian, Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (LN_PPK) diposisikan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dalam penelitian ini, variabel tersebut digunakan untuk menguji seberapa kuat konsumsi masyarakat dalam menopang perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

2.1.12 Teori Jumlah Penduduk (Variabel Kontrol)

Jumlah penduduk merupakan indikator demografi yang mencerminkan besarnya populasi yang berdomisili di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (BPS; UU No. 24 Tahun 2013). Dalam teori ekonomi pembangunan (Kuznets, 1971), jumlah penduduk

memegang peran ganda (*dualism effect*): dari sisi penawaran (*supply side*) berfungsi sebagai penyedia potensi tenaga kerja, sedangkan dari sisi permintaan (*demand side*) berperan sebagai pembentuk pasar konsumsi barang dan jasa.

Keberadaan populasi yang besar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi apabila diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk yang tidak terserap oleh sektor produktif berpotensi menjadi beban tingkat akumulasi modal dan fasilitas publik di daerah.

Dalam penelitian ini, Jumlah Penduduk (LNX3_JP) diposisikan sebagai variabel kontrol pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penggunaan variabel ini bertujuan untuk mengendalikan variasi skala demografi daerah, sehingga pengaruh murni dari variabel independen utama (Struktur Belanja Daerah, Realisasi Investasi, dan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dapat diestimasi secara akurat dan tidak bias.

2.1.12.1 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Jumlah penduduk memiliki hubungan yang kompleks dengan pertumbuhan ekonomi karena berperan ganda sebagai penyedia faktor produksi (tenaga kerja) sekaligus pembentuk potensi pasar. Heterogenitas dan ketimpangan jumlah populasi antar-kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat secara langsung menciptakan variasi pada skala perekonomian serta beban pembangunan di masing-masing daerah.

Oleh karena itu, Jumlah Penduduk (LNX3_JP) dimasukkan ke dalam model estimasi sebagai variabel kontrol. Pengendalian faktor demografi ini sangat penting untuk mengisolasi efek heterogenitas ukuran wilayah (*scale effect*), sehingga pengaruh murni (*pure effect*) dari Struktur Belanja Daerah, Realisasi Investasi, dan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi dapat terukur secara konsisten, akurat, dan bebas dari bias spesifikasi model (*omitted variable bias*).

2.1.13 Teori Dummy Covid-19

Variabel *dummy* (variabel kualitatif/dikotomis) merupakan instrumen ekonometrika yang digunakan untuk mengkuantifikasi dan mengontrol pengaruh faktor non-ekonomi atau kejutan eksternal (*exogenous shocks*) yang bersifat struktural terhadap variabel dependen. Dalam kerangka pemodelan data panel, penggunaan variabel *dummy* berfungsi untuk menangkap pergeseran intersep (*intercept shift*) akibat adanya peristiwa khusus yang membagi periode pengamatan menjadi dua kondisi ekstrem yang berbeda.

Dalam penelitian ini, variabel *dummy* dialokasikan untuk mengisolasi dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, khususnya kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada rentang waktu pengamatan (2015–2024). Pandemi ini merupakan krisis kesehatan global yang secara drastis memicu pembatasan mobilitas fisik, disrupsi rantai pasok (*supply chain disruption*), serta penyesuaian regulasi pembatasan kegiatan masyarakat (PSBB/PPKM). Berdasarkan formulasi ekonometrikanya, variabel D_COVID didefinisikan sebagai berikut:

$$D_COVID_{it} = \begin{cases} 1, & \text{pada periode Krisis COVID-19 (2020–2021)} \\ 0, & \text{pada periode Normal/Pemulihan (2015–2019 dan 2022–2024)} \end{cases}$$

Penggunaan dummy ini bertujuan agar estimasi regresi pada variabel independen utama (Struktur Belanja, Investasi, dan Konsumsi) tidak mengalami bias akibat adanya guncangan ekstrem yang sifatnya sementara (*temporary structural shock*).

2.1.13.1 Hubungan Dummy Covid-19 dengan Pertumbuhan Ekonomi

Secara teori makroekonomi, krisis kesehatan akibat COVID-19 bertindak sebagai guncangan ganda yang menekan perekonomian secara simultan dari sisi penawaran maupun permintaan:

1. Sisi Penawaran Agregat (*Aggregate Supply Shock*):

Kebijakan pembatasan mobilitas fisik merusak kapasitas produksi riil daerah. Penutupan pabrik, penurunan efisiensi industri manufaktur, pembatasan operasional UMKM, serta terhentinya rantai pasok barang dan jasa secara langsung memangkas kemampuan output riil daerah (PDRB).

2. Isi Permintaan Agregat (*Aggregate Demand Shock*):

Adanya ketidakpastian ekonomi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara drastis menekan daya beli dan tingkat konsumsi rumah tangga (C). Di sisi lain, dunia usaha menunda alokasi penanaman modal dan investasi (I), sementara pemerintah daerah terpaksa melakukan refocusing anggaran APBD secara besar-besaran untuk penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dari sejumlah jurnal dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berfungsi sebagai gambaran dan pembanding yang dapat didukung oleh kegiatan penelitian dan sebagai sumber informasi untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar

variabel penelitian memiliki dampak. Berikut merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan, Metode, dan Hasil penelitian	Perbedaan dengan Penelitian sekarang
1.	Sari, M., Syechalad, M.N., & Majid, S.A. (2016) Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Tujuan: Menganalisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode: Regresi OLS (semi log). Hasil: Ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi sebesar 74,1%.	Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur belanja pemerintah daerah, investasi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Metode: Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi data panel serta didukung oleh analisis deskriptif dan Verifikatif, menggunakan data sekunder periode 2015–2024.
2.	Saputri, K.D., & Ananda, C.F. (2023) Pengaruh Belanja Daerah, PMDN, dan	Tujuan: Menganalisis pengaruh belanja daerah, PMDN, dan	Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

	PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa	PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa periode 2006–2021. Metode: Metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel (Fixed Effect Model) menggunakan data 6 provinsi selama 16 tahun. Hasil: Belanja daerah, PMDN, dan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PMA berpengaruh dengan lag 2 tahun.	pengaruh struktur belanja pemerintah daerah, investasi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Metode: Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi data panel serta didukung oleh analisis deskriptif dan Verifikatif, menggunakan data sekunder periode 2015–2024.
3.	Sanjani, M.R., & Sari, I.F. (2023) Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat 2019–2023	Tujuan: Menganalisis pengaruh jumlah penduduk, investasi, dan pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2019–2023. Metode: Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Hasil:	Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur belanja pemerintah daerah, investasi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Metode:

		Secara simultan maupun parsial, jumlah penduduk, investasi, dan pengeluaran per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai probabilitas masing-masing variabel $> 0,05$ dan kontribusi variabel independen sangat kecil terhadap pertumbuhan ekonomi.	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi data panel serta didukung oleh analisis deskriptif dan Verifikatif, menggunakan data sekunder periode 2015–2024.
4.	Halimah, U.N., Wullandari, M., Rivaldo, A.D., & Noviarita, H. (2024) Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Masyarakat dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Tujuan: Menganalisis pengaruh pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode: Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi literatur (literature review) Hasil: Pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar dalam PDB Indonesia,	Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur belanja pemerintah daerah, investasi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Metode: Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi data panel serta didukung oleh analisis deskriptif dan Verifikatif, menggunakan data

		sedangkan pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan menstabilkan ekonomi.	sekunder periode 2015–2024.
5.	Sihite, R. (2022) Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Tujuan: Menganalisis dan membuktikan pengaruh pendapatan per kapita, jumlah konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah periode 2015–2019. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel (gabungan time series dan cross section). Hasil: Pendapatan per kapita dan konsumsi berpengaruh positif signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.	Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur belanja pemerintah daerah, investasi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Metode: Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi data panel serta didukung oleh analisis deskriptif dan Verifikatif, menggunakan data sekunder periode 2015–2024.
6.	Sari, A. D., & Wasil, M. (2025) Pengaruh	Tujuan: Menganalisis pengaruh	Tujuan:

	Pengeluaran Pemerintah, Investasi Asing, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia	pengeluaran pemerintah, investasi asing, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran terbuka di Indonesia periode 2015–2023. Metode: Pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel (Fixed Effect Model) diolah dengan EViews 12. Hasil: Pengeluaran pemerintah dan investasi asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terbuka.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur belanja pemerintah daerah, investasi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Metode: Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi data panel serta didukung oleh analisis deskriptif dan Verifikatif, menggunakan data sekunder periode 2015–2024.
7.	Magefiratil Aswar, Arniati, Dg. Maklassa (2025) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa	Tujuan: Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa (2014–2023). Metode Pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dan analisis regresi linear	

		berganda, dilengkapi uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan R^2. Hasil Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah tidak signifikan. Secara simultan keduanya berpengaruh signifikan dengan R^2 sebesar 0,808.	
8.	Mishra, B.R., & Mohanty, A.R. (2021) <i>Nexus Between Government Expenditure and Economic Growth: Evidence from Sub-National Governments in India</i>	Tujuan: Menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah, kredit institusional, dan konsumsi listrik terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah sub-nasional di India periode 1980–2013. Metode: Pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel menggunakan metode Dynamic Ordinary Least Square (DOLS) dan Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS), serta uji kointegrasi dan kausalitas Dumitrescu-Hurlin. Hasil: Pengeluaran pemerintah,	Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur belanja pemerintah daerah, investasi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Metode: Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi data panel serta didukung oleh analisis deskriptif dan Verifikatif, menggunakan data

		kredit institusional, dan konsumsi listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh terbesar berasal dari pengeluaran pemerintah, sedangkan konsumsi listrik memiliki pengaruh paling kecil. Selain itu, terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.	sekunder periode 2015–2024.
9.	Cosmas Bernard Meka’a, Silvain Raoul Fotso and, Babel Raïssa Guemdjo Kamdem (2024) <i>Investments in Basic Public Infrastructure and Their Effects on Economic Growth in a Developing Country: The Case of Cameroon</i>	Tujuan: Menganalisis pengaruh investasi pemerintah pada infrastruktur dasar-khususnya sektor jalan, energi, dan telekomunikasi-terhadap pertumbuhan ekonomi serta perilaku investasi swasta di Kamerun periode 1983–2020. Metode: Pendekatan kuantitatif menggunakan model persamaan simultan berbasis teori pertumbuhan endogen (Mankiw, Romer & Weil) dengan estimasi Generalized Method of Moments (GMM). Model mencakup	Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur belanja pemerintah daerah, investasi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Metode: Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi data panel serta didukung oleh analisis deskriptif

		dua persamaan: pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta, dengan variabel instrumen untuk mengatasi endogenitas. Hasil: Investasi infrastruktur energi memiliki pengaruh positif dan signifikan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi jalan dan telekomunikasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Terhadap investasi swasta, sektor jalan dan energi menunjukkan efek positif (crowding-in), sementara telekomunikasi justru menunjukkan indikasi crowding-out effect.	dan Verifikatif, menggunakan data sekunder periode 2015–2024.
10	Ridzuan, A. R., Razak, M. I. M., Ibrahim, Z., Noor, A. H. M., & Ahmed, E. M. (2014). <i>Household Consumption, Domestic Investment, Government Expenditure and Economic Growth: New Evidence from Malaysia</i>.	Tujuan: Menganalisis hubungan antara konsumsi rumah tangga, investasi domestik, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia selama periode 1960–2010. Metode: Pendekatan kuantitatif menggunakan model Autoregressive Distributed	Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur belanja pemerintah daerah, investasi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Metode:

		Lag (ARDL), disertai uji kointegrasi, error correction model (ECM), serta variabel dummy untuk krisis ekonomi (Krisis Asia 1997–1998 dan Krisis Global 2008–2009). Hasil: Konsumsi rumah tangga, investasi domestik, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pengaruh terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga, diikuti investasi domestik dan pengeluaran pemerintah. Selain itu, ditemukan hubungan jangka panjang antar variabel, serta kebijakan pemerintah dinilai efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas saat krisis.	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi data panel serta didukung oleh analisis deskriptif dan Verifikatif, menggunakan data sekunder periode 2015–2024.
--	--	---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, penelitian memiliki kesamaan dalam penggunaan variabel, khususnya pengeluaran pemerintah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa investasi cenderung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena investasi mampu meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, serta mendorong aktivitas ekonomi di suatu daerah. Sementara itu, pengeluaran pemerintah dalam beberapa penelitian juga menunjukkan pengaruh positif, meskipun tidak selalu signifikan, tergantung pada efektivitas alokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun demikian, terdapat juga beberapa penelitian yang menunjukkan hasil berbeda, di mana variabel seperti pengeluaran pemerintah atau investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi daerah penelitian, periode waktu, serta metode analisis yang digunakan, seperti regresi data panel, OLS, maupun pendekatan lainnya.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat persamaan pada penggunaan variabel utama yaitu pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, penelitian ini lebih difokuskan pada Kabupaten Gowa dengan periode 2014–2023 serta menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat sebagian hasil penelitian terdahulu, khususnya terkait pentingnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah belum tentu efektif jika tidak dialokasikan secara tepat pada sektor-sektor produktif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Menurut Sukirno (2016), pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan kegiatan ekonomi yang meningkatkan produksi barang dan jasa serta kesejahteraan masyarakat. Todaro dan Smith (2011) menambahkan bahwa proses ini merupakan peningkatan kapasitas produksi jangka panjang yang didorong oleh akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan efisiensi kelembagaan. Oleh karena itu, Pertumbuhan Ekonomi diposisikan sebagai variabel dependen (Y).

Variabel ini diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran. Pendekatan pengeluaran dipilih karena secara akurat menggambarkan aktivitas ekonomi riil dari sisi permintaan agregat tanpa terdistorsi oleh faktor inflasi.

Penelitian ini menggunakan Teori Permintaan Agregat Keynes (1936) untuk menjelaskan proses terbentuknya pertumbuhan ekonomi. Menurut Keynes, aktivitas ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran agregat yang dirumuskan sebagai:

$$Y = C + I + G$$

Peningkatan pada konsumsi masyarakat (C), investasi (I), dan pengeluaran pemerintah (G) akan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Kenaikan permintaan ini merangsang produsen untuk menambah volume produksi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan output daerah (PDRB).

Pandangan Keynes sejalan dengan pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini yang menggunakan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan empat variabel independen: belanja modal (X_1), belanja operasional (X_2), realisasi investasi (X_3), dan rata-rata pengeluaran per kapita (X_4). Selain itu,

jumlah penduduk (Z) digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan perbedaan karakteristik demografi antar-kabupaten/kota di Jawa Barat agar estimasi yang dihasilkan lebih akurat.

struktur belanja pemerintah daerah dalam APBD berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi. Dalam teori Keynes (1936), pengeluaran pemerintah (G) merupakan komponen penting permintaan agregat yang berpotensi meningkatkan output daerah.

Belanja Modal (X_1) adalah pengeluaran pemerintah untuk pembangunan aset tetap dan infrastruktur publik. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), pengeluaran produktif ini meningkatkan kapasitas produksi jangka panjang melalui efisiensi distribusi, penurunan biaya logistik, dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, belanja modal memperkuat sisi permintaan agregat sekaligus sisi penawaran agregat.

Melalui *multiplier effect* (Samuelson & Nordhaus, 2010), pembangunan infrastruktur menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini memperbesar konsumsi serta memicu rantai aktivitas produksi di berbagai sektor, sehingga menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar daripada nilai pengeluaran awal pemerintah.

Belanja Operasional (X_2) merupakan pengeluaran rutin pemerintah daerah untuk belanja pegawai, barang/jasa, subsidi, hibah, dan pelayanan publik (Mardiasmo, 2018). Belanja ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan agregat (*demand-side*) jangka pendek. Pembayaran gaji dan subsidi menyuntikkan likuiditas yang meningkatkan daya beli serta konsumsi masyarakat, sehingga mendorong permintaan barang/jasa dan produksi daerah.

Realisasi Investasi (X_3) Merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal (*capital formation*) dan penambahan aset tetap riil dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) (Sukirno, 2016). Menurut Todaro dan Smith (2011),

PMTB berperan vital dalam memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong produktivitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Hubungan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB / Realisasi Investasi X_3) dengan pertumbuhan ekonomi dijelaskan melalui Teori Harrod-Domar (1939, 1946). PMTB memiliki peran ganda: meningkatkan pengeluaran agregat dalam jangka pendek (*demand-side*) serta menambah stok barang modal (mesin, infrastruktur, teknologi) untuk memperluas kapasitas produksi riil jangka panjang (*supply-side*). Makin besar akumulasi PMTB dari PMDN dan PMA, makin tinggi potensi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh Teori Rostow (1960), di mana kenaikan rasio PMTB produktif menjadi syarat utama bagi daerah untuk mencapai tahap lepas landas (*take-off*).

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (X_4) merepresentasikan konsumsi rumah tangga (C). Menurut BPS, indikator ini mengukur rata-rata biaya penduduk untuk konsumsi makanan dan nonmakanan. Sesuai Teori Keynes (1936), konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar permintaan agregat. Meningkatnya pengeluaran per kapita mencerminkan penguatan daya beli masyarakat yang mendorong respon produsen untuk meningkatkan output dan memicu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sukirno (2016) serta Todaro dan Smith (2011), peningkatan pengeluaran masyarakat mencerminkan penguatan daya beli dan kesejahteraan yang memberikan sinyal bagi produsen untuk menambah volume produksi. Melalui *multiplier effect*, konsumsi per kapita yang tinggi memicu rantai ekonomi: meningkatkan pendapatan pelaku usaha, mendorong produksi, dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, daerah dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang tinggi cenderung memiliki aktivitas ekonomi yang lebih dinamis.

Jumlah Penduduk (Z) digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan perbedaan skala dan karakteristik demografi antar-kabupaten/kota di Jawa Barat. Menurut

Todaro dan Smith (2020), populasi memiliki peran ganda: dari sisi penawaran (*supply*) sebagai ketersediaan potensi tenaga kerja, dan dari sisi permintaan (*demand*) sebagai potensi pasar. Mengontrol variabel penduduk memastikan estimasi pengaruh murni dari variabel independen utama (X_1, X_2, X_3, X_4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) tidak terdistorsi oleh bias ukuran daerah (*scale effect*).

Selain itu, penelitian ini memasukkan Variabel *Dummy* COVID-19 (D) untuk mengontrol faktor guncangan eksogen (*exogenous shock*). Berdasarkan teori fluktuasi ekonomi, pandemi COVID-19 menimbulkan disrupsi signifikan pada rantai pasok dan permintaan agregat daerah. Variabel *dummy* dikotomis ($D = 1$ untuk periode pandemi 2020–2021; $D = 0$ untuk periode lainnya) digunakan untuk mengisolasi pergeseran intersep, sehingga estimasi pengaruh variabel ekonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi tetap konsisten dan tidak terkontaminasi oleh distorsi krisis.

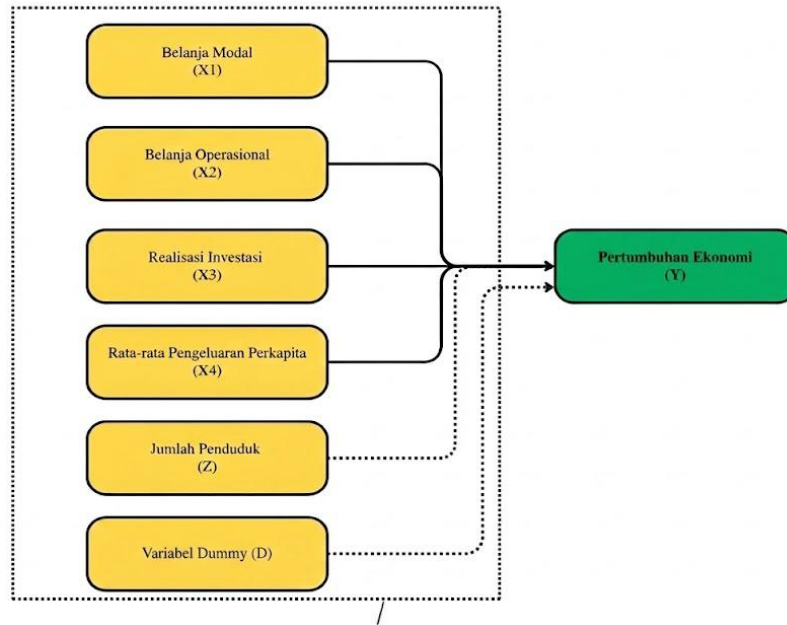
Penelitian ini juga diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Sari, Syechalad, dan Majid (2016) menunjukkan bahwa investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian Saputri dan Ananda (2023) menemukan bahwa belanja daerah, PMDN, dan PMA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Penelitian Halimah dkk. (2024) menjelaskan bahwa konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, Ridzuan dkk. (2014) menemukan bahwa konsumsi rumah tangga, investasi domestik, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia dalam jangka panjang. Mishra dan Mohanty (2021) juga membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah sub-nasional di India. Sementara itu, penelitian Cosmas

Bernard Meka'a dkk. (2024) menunjukkan bahwa investasi infrastruktur publik mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

Sintesis teori dan empiris menegaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (Y)—yang diukur melalui laju pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran—dipengaruhi oleh dinamika komponen pengeluaran agregat daerah. Belanja Modal (X_1) berperan memperkuat infrastruktur dan kapasitas produksi, sedangkan Belanja Operasional (X_2) mendukung kelancaran pelayanan publik serta menjaga daya beli masyarakat. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB / Realisasi Investasi X_3) memicu akumulasi modal dan produktivitas jangka panjang, sementara Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (X_4) mencerminkan konsumsi rumah tangga yang menggerakkan permintaan pasar.

Untuk menghasilkan estimasi yang presisi, penelitian ini memasukkan Jumlah Penduduk (Z) sebagai variabel kontrol guna mengendalikan heterogenitas skala demografi antar-kabupaten/kota di Jawa Barat, serta Variabel *Dummy* COVID-19 (D) untuk mengisolasi dampak guncangan eksogen selama pandemi. Dengan demikian, pengaruh simultan maupun parsial dari variabel independen utama (X_1, X_2, X_3, X_4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y):



Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————> : Hubungan Parsial

----- : Hubungan Variabel Kontrol

----- : Hubungan Variabel Dummy

..... : Hubungan Simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban yang ada dan harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Belanja Modal diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024
2. Variabel Belanja Operasional diduga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa barat Tahun 2015-2024
3. Variabel Realisasi Investasi diduga berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024
4. Variabel Rata-rata Pengeluaran Perkapita diduga berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024.
5. Variabel Rata-rata Pengeluaran Perkapita diduga berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024.
6. Variabel Jumlah Penduduk diduga berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024.
7. Variabel belanja modal, belanja operasional, Realisasi Investasi, Rata-rata Pengeluaran Perkapita, dan Jumlah Penduduk secara simultan diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024.